

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh dari Karakteristik Pemerintah Daerah (yang diproksikan dalam Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah) dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (yang diproksikan dalam Indeks Pembangunan Manusia) tahun anggaran 2013 – 2015 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar $4,305 > 2,31$ (F table) dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen Karakteristik Pemerintah Daerah (yang diproksikan dalam Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah), Temuan Audit BPK berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Ukuran pemerintah daerah yang didasarkan pada total pendapatan dimana pemerintah daerah dengan total pendapatan yang lebih besar dapat memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan masyarakat guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.
3. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bukti peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah tidak terlepas dari peran masyarakat

daerah tersebut. kerjasama yang baik antara kepala daerah dan masyarakatnya merupakan hal penting agar daerah tersebut dapat maju sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

4. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat membantu berkembangnya suatu daerah karena dana perimbangan yang diberikan sesuai dengan sasarannya seperti dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Aliran dana yang diberikan dari pemerintah pusat sangat membantu daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil. Hasil penelitian ini bahwa dana perimbangan dapat mempengaruhi peningkatan IPM dari sebuah daerah tersebut, karena dana perimbangan dapat membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya melalui masyarakat dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga tingkat kemiskinan daerah tersebut dapat rendah.

5. pemerintah melakukan belanja daerah baik dalam bentuk belanja rutin maupun belanja modal dengan harapan terjadi peningkatan aktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Namun, dewasa ini alokasi belanja daerah masih dipandang belum efektif dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin rendahnya alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadinya peningkatan proporsi belanja pegawai yang tidak berpengaruh langsung pada pembangunan daerah.

6. Semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu Pemda maka semakin rendah skor kinerja Pemda tersebut. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati

dalam masalah pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

5.2 Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada Penelitian ini variabel independen yang digunakan dalam model penelitian hanya mampu menjelaskan variabel dependen dengan 47,40% sehingga 52,60% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini menunjukkan masih terdapat berbagai variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data Pemerintah Daerah pada tahun 2013 - 2015 sehingga menyebabkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan saran-saran berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Akuntabilitas Laporan Keuangan serta dapat menggunakan proksi pengukuran lain terkait konservatisme yang dianggap dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data periode yang lebih panjang, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari pengaruh variabel-variabel yang digunakan dengan lebih baik dan konsisten.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada tingkat Kecamatan dari sebuah Kabupaten/Kota agar kelihatan jelas dan dapat dilihat perbandingan antar kecamatan mana yang perkembangan daerahnya dapat cepat berkembang. Karena kinerja pemerintah daerah tidak hanya dapat kita lihat dari Bupati/Walikota namun dapat kita lihat dari seberapa besar pengaruh dari Camat untuk membantu kinerja dari Bupati/Walikota.
4. Kepala Daerah haruslah mampu mengelola kekayaan daerahnya dengan sebaik mungkin dan transparan agar tidak terjadi kesimpangan – kesimpangan dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga jelas aliran dana daerah tersebut kemana saja perginya. Sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.